



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen, Irjen, Dirjen Rehabilitasi dan Kepala Badiklat Pensos Kementerian Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 11 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020. 2. Membahas masalah aktual dan alternatif solusinya.
Ketua Rapat	: <b>H. Marwan Dasopang</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Eselon I Kementerian Sosial RI beserta jajaran;

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, **H. Marwan Dasopang** dengan didampingi Wakil Ketua Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

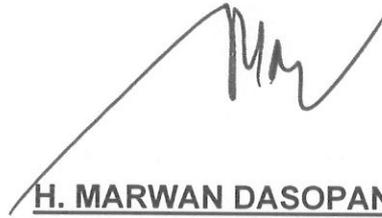
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan agenda **“Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 serta Penyelesaian Masalah-Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI atas kinerja, target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran sesuai hasil efisiensi dan optimalisasi anggaran Tahun 2020.
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi laporan keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut dan diharapkan akan dipertahankan untuk tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan datang.
3. Komisi VIII DPR RI meminta setiap program yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI dapat disinergikan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal untuk mengkoordinasikan hasil realokasi anggaran di setiap Eselon I agar pelaksanaan programnya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peta jalan (*road map*) dalam penanganan kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) sebab jika tidak akan menjadi “bom waktu” di masa yang akan datang.
  - b. Memastikan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi, validasi data dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait data fakir miskin dan orang tidak mampu.
6. Komisi VIII DPR RI bersepakat dengan Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai program dan anggaran Tahun 2020.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG**